

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 25 Oktober 2021

**Baqiatus Sholihah**

NIM: 161120077

## ABSTRAK

Nama : Baqiatus Sholihah, NIM : 161120077, Judul Skripsi: Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemakzulan (*Impeachment*) Presiden dan/atau Wakil Presiden Dalam UU MK No 8 Tahun 2011 Perspektif Presidensial Indonesia.

Latar Belakang Masalah dari skripsi ini adalah Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, atau yang biasa dikenal sebagai masa pemerintahan Orde Lama. Presiden Soekarno mengalami pemakzulan. Berjalan sekitar enam tahun dari masa pemerintahannya, diawali dari peristiwa G-30-S/PKI menjadi titik awal melemahnya pengaruh politik Presiden Soekarno dan antara dampaknya, kendalanya atas MPRS merosot tajam. Puncaknya, MPRS menolak pertanggungjawaban Soekarno dan mencabut mandatnya sebagai Presiden. Pada tanggal 21 Mei 1998. Tapi tidak hanya sampai disitu, pada masa Reformasi pun masih terjadi konflik politik yang berujung pada pemberhentian Presiden. Yakni pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, hal ini disebabkan karena beberapa masalah yang ditimbulkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid diantaranya, terindikasikan oleh penyalahgunaan dana Bulog dan dana Brunei Darussalam dan melakukan pergantian jabatan Kapolri Jenderal (Pol) S. Bimantoro tanpa dengan persetujuan DPR.

Rumusan Masalah dari skripsi ini adalah : 1. Bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pemakzulan (*Impeachment*) Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia?, 2. Bagaimana Dampak Pemakzulan (*impeachment*) di Indonesia, 3. Bagaimana relevansi sistem presidensial dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi terkait pemakzulan (*impeachment*) Presiden dan/atau Wakil Presiden?

Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah: 1. Untuk mengetahui kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pemakzulan (*Impeachment*) Presiden di Indonesia. Untuk mengetahui Dampak Pemakzulan (*impeachment*) di Indonesia, 3. Untuk mengetahui relevansi sistem presidensial dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi terkait pemakzulan (*impeachment*) Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Metodologi Penelitian dalam penulisan ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis normative yaitu pendekatan melalui perundangan-undangan (*statue approach*). Adapun data yang digunakan adalah yaitu berasal dari data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan kepustakaan (*library research*).

Dari penelitian ini dapat disimpulkan : 1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pemakzulan (*Impeachment*) Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia dengan batasan yang jelas sebagai bentuk penghormatan atas konstitusionalisme yang telah diatur dalam UU MK No 8 tahun 2011. Mahkamah Konstitusi bertugas menerima permohonan dari DPR terkait pemakzulan (*impeachment*) Presiden dan/atau Wakil Presiden, membuktikan dan memutuskan apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden melanggar konstitusi atau tidak. 2. Dampak terjadinya pemakzulan (*impeachment*) di Indonesia, sangat berdampak terhadap sosial politik dan berjalannya ketatanegaraan di Indonesia. Pembatasan isi kekuasaan presiden melalui adanya peraturan mengenai *impeachment* mempunyai pengaruh terhadap sistem ketatanegaraan yaitu dengan semakin memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Dan pada praktiknya terjadi hubungan saling mengawasi dan mengimbangi antar cabang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. 3. Relevansi sistem presidensial dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi terkait pemakzulan (*impeachment*) Presiden dan/atau Wakil Presiden masih sangat relevan terhadap sistem ketatanegaraan di Indonesia dan itu terlihat dari tidak adanya amandemen UU MK terkait pemakzulan (*impeachment*) hingga saat ini.



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl. Jendral Sudirman No 30 Serang 24118 Tlp. (0254)2003323 Fax (0254)200022

---

Nomor : Nota Dinas

Lamp : 1 (satu) Eksemplar

Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah

a.n. Baqiatu Sholihah

NIM: 161120077

Kepada Yth

Dekan Fakultas Syariah

UIN SMH Banten

di-

Serang

*Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Dipermauklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara **Baqiatu Sholihah NIM 161120077**, Judul Skripsi: **Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemakzulan (Impeachment) Presiden dan/atau Wakil Presiden Dalam UU MK No 8 Tahun 2011 Perspektif Presidensial Indonesia**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Serang, 25 Oktober 2021

Pembimbing I

Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum.

NIP. 19690906 199603 2 002

Pembimbing II

Dr. Dedi Sunardi, M.H.

NIP. 1980092 6200901 1 007

**KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM  
PEMAKZULAN (IMPEACHMENT) PRESIDEN DAN/ATAU  
WAKIL PRESIDEN DALAM UU MK NO 8 TAHUN 2011  
PERSPEKTIF PRESIDENSIAL INDONESIA**

Oleh:

**Baqiatus Sholihah**  
**NIM. 161120077**

Menyetujui,

Pembimbing I

  
**Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19690906 199603 2 002**

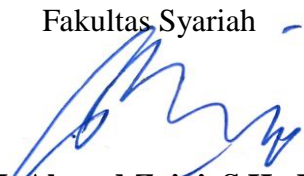
Pembimbing II

  
**Dr. Dedi Sunardi, M.H.**  
**NIP. 1980092 6200901 1 007**

Mengetahui,

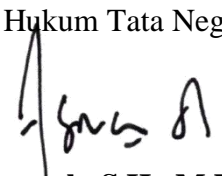
Dekan

Fakultas Syariah

  
**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si**  
**NIP. 19650607 199203 1 005**

Ketua

Jurusan Hukum Tata Negara

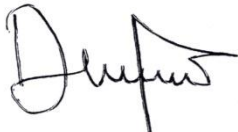
  
**Atu Karomah, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19690214 199903 2 001**

## PENGESAHAN

Skripsi a.n.: Baqiatu Sholihah, NIM: 161120077, berjudul: **Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemakzulan (Impeachment) Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Dalam UU MK No 8 Tahun 2011 Perspektif Presidensial Indonesia**, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 25 Oktober 2021. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Negeri Islam Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 25 Oktober 2021

Sidang Munaqasyah,  
Ketua Merangkap Anggota,



**Dra. Hj. Denna Ritonga, M.S.I.**  
NIP. 19670402 199403 2 001

Sekretaris Merangkap Anggota,



**Fuad Zainuddin, M.E.**  
NIP: 19850729 201903 1 003

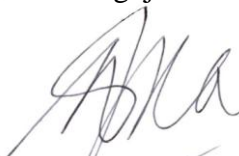
### Anggota-Anggota

Penguji I



**Dr. Muhammad Ishom, M.A.**  
NIP. 19760623 200604 1 002

Penguji II



**H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si.**  
NIP. 19591104 1999403 1 002

Pembimbing I



**Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19690906 196903 2 002

Pembimbing II



**Dr. Dedi Sunardi, M.H.**  
NIP. 1980092 6200901 1 007

## **PERSEMBAHAN**

*Alhamdulillah rabbil'alamiin..*

*Dengan penuh syukur  
kepada Allah SWT Atas  
terselesaikan skripsi  
sederhana ini dengan  
usaha dan perjuangan  
dalam pembuatannya.*

*Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :*

*Ayah H.Bukhori S.E (Alm)., dan Ibu Hj. Eda Yati (Almh).,  
tersayang. Dua manusia yang selalu memberi cinta dan kasih  
sayang yang tulus hingga akhir hayat mereka,*

*Terima kasih atas doa yang selalu kalian panjatkan untuk kebaikan  
dan kesuksesanku hingga terselesaikannya skripsi ini. Yang  
merupakan bagian dari salah satu doa kalian yang Allah kabulkan.*

## MOTTO

لِللَّهِ شُهَدَاءُ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ ۖ عَلَىٰ ٱلْأَ  
يَأْيُهَا تَعَدَّلُوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّٰمِينَ ۖ ءَعَدِّلُوا هُوَ أَقْرَبُ  
لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

*Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*

(QS. An-Maidah[5]:8)

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis Baqiatu Sholihah, lahir di Indramayu pada tanggal 19 Maret 1998 dari pasangan Bapak H. Bukhori S.E (Alm) dan Ibu Hj. Eda Yati (Almh).

Adapun jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh yaitu sekolah tingkat dasar di SD Negeri YPWKS V 2010, kemudian sekolah tingkat menengah pertama di SMP La-Tansa lulus pada tahun 2013, kemudian sekolah tingkat menengah akhir di SMA La-Tansa lulus pada tahun 2016.

Melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun akademik 2016/2017 pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah.

Penulis juga aktif dalam organisasi intra kampus, UKM MENWA (Resimen Mahasiswa) dan Organisasi PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten menjabat sebagai pengurus pada biro pemberdayaan perempuan tahun 2017-2018 dan 2018-2019.



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi Ini Berjudul: *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemakzulan (Impeachment) Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Dalam UU MK No 8 Tahun 2011 Perspektif Presidensial Indonesia* merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan karena keterbatasan ilmu dan kurangnya keterampilan. Akan tetapi berkat bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan memimpin serta mengembangkan Universitas

Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten menjadi lebih maju.

2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Bapak Dr. H. Muhammad Ishom, M.A Wakil Dekan I Bidang Akademik, Bapak Dr. Dedi Sunardi, Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Bapak Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, yang telah membantu, memberi dukungan dan motivasi terhadap penulis, sehingga terlaksananya skripsi ini.

3. Ibu Atu Karomah, S.H., M.Hum. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara, dan Bapak Arif Rahman, M.H., Sekertaris Jurusan Hukum Tata Negara, yang telah mengasuh dan mengarahkan penulis selama kuliah di Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
4. Ibu Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum Pembimbing I dan Bapak Dr. Dedi Sunardi, M.H Pembimbing II yang telah memberikan, nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

6. Seluruh Civitas Akademik, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah membantu pelayanan administrasi selama perkuliahan dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, masih jauh dari bentuk kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan berbagai kritik dan juga saran yang positif dan membangun dari berbagai pihak atas segala kekurangan, kekeliruan dan kesalahan dalam pembuatan skripsi ini menjadi tanggungjawab penulis.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca umumnya. Aamiin.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh***

Serang, 25 Oktober 2021

**Baqiatus Sholihah**

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>SURAT PENGAJUAN</b> .....	iii
<b>SURAT PERSETUJUAN DEKAN</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	viii
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Metodologi Penelitian.....	10
F. Kerangka Teori .....	14
G. Studi Kajian .....	25
H. Sistematika Penulisan .....	27
<b>BAB II KONSTITUSI NEGARA INDONESIA</b>	
A. Sistem Presidensial di Indonesia. ....	29
B. Sejarah Konstitusi di Indonesia. ....	42
C. Sejarah Mahkamah Konstitusi .....	57
D. Tugas dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi .....	64

### **BAB III PEMAKZULAN (IMPEACHMENT) PRESIDEN**

#### **DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN**

A. Devinisi Pemakzulan (Impeachment).....	69
B. Sejarah Pemakzulan (Impeachment) di Indonesia.....	75
C. Putusan Pemakzulan (Impeachment) Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 .....	86
D. Prosedur dan Mekanisme Impeachment .....	93

### **BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN**

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutuskan Pemakzulan (Impeachment). .....	108
B. Dampak terjadinya pemakzulan (impeachment) di Indonesia....	120
C. Relevansi sistem presidensial dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi terkait pemakzulan (impeachment) Presiden dan/atau Wakil Presiden.....	125

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	109
B. Saran .....	110

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**